

## Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang

Mega Astuti<sup>1</sup>, Retno Wulandari <sup>2</sup>, Supami Wahyu Setyowati <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

### Corresponding Author

Nama Penulis: Mega Astuti

E-mail: [astutimega700@gmail.com](mailto:astutimega700@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh parsial, simultan dari pemahaman Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Populasi penelitian yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kantor Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Malang, sebanyak 100 responden. Pengambilan sampel penelitian menggunakan metode pengumpulan data dan menyebarkan kuesioner. Data penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda, menggunakan SPSS 2.0. Hasil penelitian adalah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

**Kata kunci** - sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### Abstract

This study aims to determine the partial, simultaneous effect of understanding the influence of the Internal Control System, Regional Financial Accounting System, Human Resource Competence on the Quality of Local Government Financial Reports. The research population is the Regional Apparatus Work Unit at the Regional Asset Finance Agency (BKAD) Malang, as many as 100 respondents. Sampling research using data collection methods and distributing questionnaires. Research data using multiple linear regression analysis, using SPSS 2.0. The results of the study are the Internal Control System has an effect on the Quality of Local Government Financial Statements, the Regional Financial Accounting System has no effect on the Quality of Local Government Financial Statements, Human Resource Competence has an effect on the Quality of Local Government Financial Reports.

**Keywords** - internal control, regional financial accounting, human resources, local government financial reports

## **PENDAHULUAN**

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang bertanggung jawab kepada publik (publik) dan parlemen dalam bentuk pemerintah atau badan komersial. Laporan keuangan yang dirancang oleh pemerintah sebagai entitas publik merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dan transparansi pengelolaan keuangan publik pemerintah, yang disebut pelaporan keuangan berbasis prinsip. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dirumuskan oleh pemerintah. Pengelolaan keuangan organisasi sektor publik perlu memiliki dan menerapkan tata kelola yang baik (Mutiana et al., 2017).

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dan keterbukaan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah atas penggunaan sumber daya dan penggunaan APBN dan APBD (Armeli, 2017). Berbagai pihak yang berkepentingan untuk membuat suatu kebijakan akan menggunakan laporan keuangan yang telah dirancang oleh pemerintah. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP dijelaskan bahwa ada beberapa pihak yang menggunakan laporan keuangan ini, yaitu masyarakat, perwakilan rakyat, dewan pengawas, dewan audit, pemerintah dan badan politik. Karena laporan keuangan digunakan oleh banyak orang, maka data yang disajikan dalam laporan keuangan harus bermanfaat dan bermakna serta sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Laporan keuangan atau keuangan yang baik dan memuat informasi yang berkualitas akan membuktikan bahwa pemerintah telah mampu mengikuti ketentuan atau tata cara pelaporan laporan keuangan yang layak dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan sumber daya dan kinerja pemerintah.

Laporan keuangan juga merupakan pertanggungjawaban anggota sumber daya ekonomi oleh suatu entitas dalam bentuk data keuangan. Data yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus sinkron dengan yang diminta oleh pemerintah. Laporan keuangan juga dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan hal-hal yang dianggap penting bagi pemerintah daerah. Laporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan, yang terdiri dari keputusan ekonomi, sosial dan politik. Laporan keuangan bertujuan umum ditujukan untuk mencapai harapan publik. Pada umumnya pengguna laporan adalah lembaga legislatif yang disahkan dalam ketentuan PPU (Ifat, 2018).

Pemeriksaan BPK terhadap 537 LKPD menunjukkan 6.053 kekurangan SPI, yaitu 2.156 kekurangan pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.657 kekurangan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.240 kekurangan pengendalian intern (IHPS I 2017). BPK mengungkapkan minimnya rekomendasi solusi dari pemerintah untuk mengurangi permasalahan yang selama ini terjadi.

IHPS Semester I 2017 berkata bahwa alasan BPK buat Pemerintah Daerah merogoh solusi menurut kekurangan termasuk rendah ditindak lanjuti. Penyelidikan TLRHP pemerintah wilayah 2015-30 Juni 2017 BPK telah mengusut 84.456 alasan output inspeksi senilai Rp 24,19 triliun buat 542 pemerintah wilayah. Berdasarkan jumlah itu, alasan yg diambil berjumlah 39.872 alasan (47,2%) berjumlah Rp 3,13 triliun. Sebanyak 30.975 alasan (36,7%) berjumlah Rp. 8,28 triliun bukan cocok menggunakan alasan, berjumlah 13.569 alasan (16,0%) berjumlah Rp. 12,63 triliun ditindak lanjuti, sebesar 40 alasan (0,1%) berjumlah Rp. 0,15 triliun belum sanggup ditindak lanjuti. Berdasarkan alasan diatas entitas telah menciptakan penyerahan aset ke kas negara/ wilayah berjumlah Rp. 2,91 triliun (asal IHPS Semester I 2017: Jakarta) pada akses lepas 24 Desember 2020 melalui Website: BPK RI.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Sistem Pengendalian Intern**

Menurut (Rokhlinsari & Hidayat, 2016) Sistem Pengendalian Intern termasuk pada komponen krusial pada manajemen perusahaan, adalah dasar bagi aktivitas operasional perusahaan itu sendiri sebagai akibatnya operasional perusahaan bisa beroperasi secara efektif, sehat & aman. Bagi perusahaan apabila sistem-sistem pengendalian internnya itu berjalan secara

efektif maka hal ini akan berdampak dalam kurangnya resiko terjadinya kerugian yg mungkin akan ditanggung perusahaan, penyimpangan, & pelanggaran aspek lain yg akan berdampak jelek dalam perusahaan. Agar Sistem Pengendalian Intern sanggup berjalan menggunakan baik wajib didukung menggunakan pertanggungjawaban manajemen perusahaan itu sendiri.

b. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

(Halim, 2018) sistem akuntansi keuangan pemerintah wilayah yaitu cara yg dilakukan sebagai akibatnya bisa memperoleh berita krusial diperlukan pihak internal juga eksternal. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu proses sosialisasi indera ukur, catatan tentang transaksi keuangan baik menurut wilayah, provinsi, kabupaten juga kota dibentuk berupa berita yg krusial akan pengambilan keputusan bersifat saksama bagi orang yg memerlukan baik internal juga eksternal.

c. Kompetensi Sumber Daya Manusia

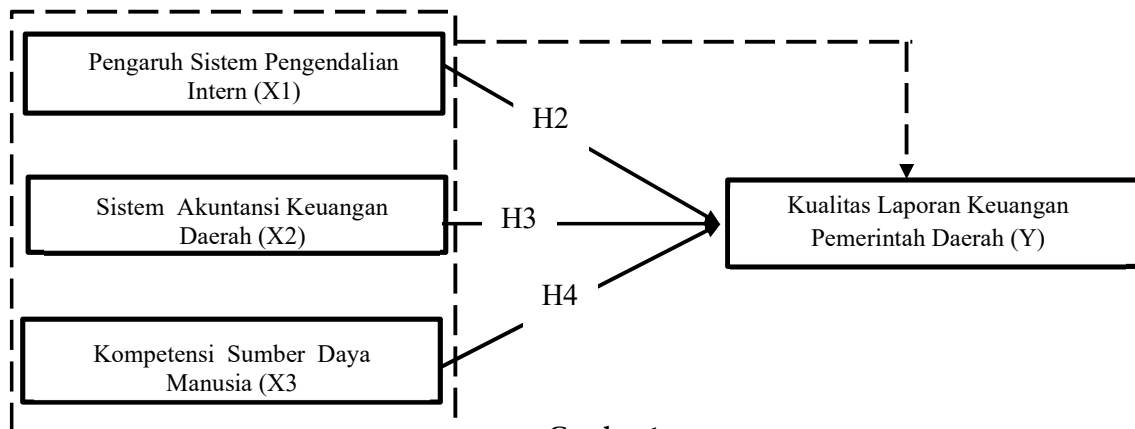
(Triwardana, 2017) Yang dimaksud dengan kompetensi sumber daya manusia meliputi pengalaman seseorang, kemampuan suatu kelompok atau kesempatan untuk memenuhi perannya untuk memenuhi harapan secara efektif dan efisien. Untuk dapat mengenali KSDM dalam kinerja suatu fungsi dalam akuntansi, hal ini dapat dievaluasi dengan meningkatkan tanggung jawab mereka, kompetensi sumber daya mereka.

d. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PP 2010 menyatakan bahwa KLKPD dapat dievaluasi dalam bentuk karakteristik kualitatif laporan keuangan (Mokoginta et al., 2017). Fitur dari laporan keuangan ini adalah bentuk penilaian wajib yang dilakukan dengan menggunakan informasi akuntansi untuk melengkapi harapan yang dicapai.

e. Temuan (Wati et al, 2014) dan (Faishol et al, 2016) telah sampai pada kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas keuangan. Kesimpulan bahwa hasil tersebut sama dengan yang dilakukan oleh (Rohmah et al, 2020) pada penelitiannya, sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dan (Armel, 2017) dalam studinya bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh akan Kualitas Laporan Keuangan.

f. Kerangka konseptual



Gambar 1.  
Kerangka Konseptual Penelitian

g. Hipotesis

Kontrol internal memberikan informasi yang benar tentang akuntansi perusahaan. Data akuntansi perusahaan dapat bermakna, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Hal ini

menunjukkan manfaat pengendalian internal untuk memastikan kualitas pelaporan keuangan. Dampak SPI terhadap KLKPD yaitu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah memerlukan tahapan yang harus diselesaikan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah daerah (Rokhlinsari & Hidayat, 2016). Studi (Faishol, 2016) dan (Kiranayanti & Erawati, 2016) bahwa SPI berpengaruh terhadap KLKPD, maka hipotesisnya:

H<sub>1</sub> : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(Halim, 2018) menyatakan bahwa SAKD mempengaruhi KLKPD, dan akuntansi keuangan daerah adalah pembukuan secara khusus, berurutan, berdasarkan prinsip dan standar tertentu. di sektor keuangan. Dapatkan informasi akurat di bidang metode dan keuangan. SAKD Mempengaruhi Kualitas laporan Keuangan Untuk memperoleh pelaporan keuangan yang akurat, metode akuntansi yang memadai untuk menerapkan SAKD harus meningkatkan pengaruhnya terhadap KLKPD. Berdasarkan hasil survei (Wati et al., 2014) dan (Mokoginta et al., 2017), SAKD berpengaruh terhadap KLKPD, sehingga hipotesis yang diajukan adalah:

H<sub>2</sub> : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Susanto, 2017) menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan bagian penting dari akuisisi data yang berkualitas, karena alat untuk memperoleh informasi yang berkualitas hanya dapat melakukan sebagian kecil dari fungsinya. Menurut survei (Kiranayanti & Erawati, 2016) dan (Armel, 2017), mengatakan KSDM berpengaruh terhadap KLPD, hipotesis didasarkan pada penjelasan di atas, karena keterampilan orang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesisnya adalah:

H<sub>3</sub> : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Secara khusus, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa SPI, SAKD, dan KSDM mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Survei (Faishol, 2016), (Tang, 2020), dan (Armel, 2017) menyatakan bahwa SPI, SAKD, dan KSDM mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, hipotesisnya adalah:

H<sub>4</sub> : Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## **METODE**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman SPI, SAKD dan KASDM terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Metode survei merupakan pendekatan kuantitatif, yaitu survei yang mengukur ketepatan perilaku, pengetahuan, opini, dan situasi (Sugiyono, 2011).

Sumber data survei ini, yaitu data primer, dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner langsung kepada responden. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian uji penerimaan klasikal, dan terakhir kualitas data dengan analisis regresi linier berganda (Sugiyono, 2011).

Data dalam penelitian ini bersifat kuantitatif yaitu direpresentasikan secara numerik untuk menunjukkan nilai dari variabel yang diwakilinya. Populasi penelitian ini adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek dengan besaran dan sifat tertentu yang ingin diteliti dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam survei ini adalah SKPD Kantor BKAD (Badan Keuangan dan aset daerah) Kota Malang.

Survei ini tergolong sensus karena memiliki jumlah penduduk yang relatif kecil atau kurang dari 100 responden. Oleh karena itu, dalam survei ini peneliti merekrut 100 responden yaitu petugas

pelayanan BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah), sekretaris, akuntansi, dan staf keuangan dari kota Malang. Pengambilan sampel ini menggunakan *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang menetapkan kriteria tertentu untuk sampel yang diselidiki.

#### Definisi operasional

##### 1. Variabel Independen

- Sistem pengendalian internal menurut Putri et al (2015) menggambarkan SPI sebagai prosedur yang bekerja dalam mengelola, memantau, dan mengukur sumber daya yang ada dalam suatu organisasi.
- Menurut (Hanifa et al., 2016), produksi laporan keuangan yang berkualitas dan andal bagi pemerintah daerah dipengaruhi oleh SAKD.
- Menurut (Darmawan & Darwanis, 2018), keberhasilan penyampaian laporan keuangan yang berkualitas sangat bergantung pada kemampuan orang tersebut.

##### 2. Variabel Dependen

Menurut (Rohmah et al., 2020), kualitas pelaporan keuangan daerah merupakan persyaratan normatif agar pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan kualitas yang diinginkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

#### Instrumen penelitian

Menurut (Sugiyono, 2013), instrumen penelitian adalah alat untuk memperoleh dan mengumpulkan data selama penelitian. Alat penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merinci variabel penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa rangkaian pertanyaan dan menggunakan pendekatan statistik untuk mengubah data menjadi data kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan nilai-nilai yang diberikan dalam kuesioner yang diberikan kepada responden dengan menggunakan metode skala likert.

Skala likert Digunakan oleh peneliti dalam survei yang dirancang untuk memungkinkan responden mengevaluasi jawaban atas pertanyaan tertentu berdasarkan variabel survei yang disurvei dan mengklasifikasikan variabel independen dan dependen ke dalam Empat tingkat, dari 1 sampai 4. Uji ukuran skala Likert sebagai berikut:

**Tabel 1.**

Skala Likert dengan peningkatan angka satu sampai empat

SKALA LIKERT		
Skor 4	SS	Sangat Setuju
Skor 3	S	Setuju
Skor 2	TS	Tidak Setuju
Skor 1	STS	Sangat Tidak Setuju

#### Teknik Analisis Data

##### 1. Uji Validitas

Uji validasi dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa kuesioner tersebut valid. Jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel dan nilainya positif, Anda dapat memvalidasi kuesioner. Elemen atau indikator pertanyaan tersebut kemudian divalidasi (Ghozali, 2013). Oleh karena itu, hasil pengujian peneliti menunjukkan bahwa semua faktor variabel sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah, Kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah valid. Oleh karena itu, kondisi yang valid terpenuhi.

##### 2. Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali, 2011), pengujian reliabilitas menentukan apakah instrumen survei (kuesioner) secara andal mengukur informasi yang digunakan. Kriteria pengujian reliabilitas

adalah suatu kuesioner dapat dinyatakan reliabel jika nilai cronbach's alpha  $> 0,60$ . Hasil uji reliabilitas peneliti menyatakan variabel sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah, Kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki nilai *cronbach alpha*  $> 0,60$  sehingga reliabel. Hal Ini memenuhi persyaratan keandalan alat pengukur.

3. Teknik analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda. Regresi berganda adalah cara yang mudah untuk menentukan pengaruh yang ada antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Variabel bebas diperoleh dari sistem pengendalian intern (X1), sistem akuntansi keuangan daerah (2) dan kompetensi sumber daya manusia (X3) dan variabel terikatnya adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

### Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik untuk penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

#### Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis yang dibuat dengan menggunakan Uji -F yaitu digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Y). jika nilai *sig* uji F lebih kecil  $<$  dari 0,05 atau 5% maka dinyatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan Uji-T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen Y. kriteria pengujian uji T adalah apabila nilai *sig* uji T lebih kecil  $<$  dari alpha 5% atau 0,05 maka hipotesis satu diterima tetapi jika nilai *sig* uji T lebih besar  $>$  dari alpha 5% atau 0,05 maka hipotesis satu ditolak.

## PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk diuji apakah variable residual berdistribusi normal dalam model regresi. Uji normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Oleh karena itu, hasil uji normalitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *sig* (dua sisi) adalah 0,200  $>$  0,05. Pada simpulan tercantum ditentukan maka data yang dipakai dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Hasil uji multikolinearitas digunakan untuk menguji segala sesuatu model regresi mendeteksi adanya korelasi antar variabel bebas. Uji multikolinearitas dapat dikonfirmasi dengan nilai tolerance and variance factor (VIF). Jika toleransi  $>$  0,1 atau sesuai nilai VIF  $<$  10. Oleh karena itu, perhitungan toleransi menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas dari model regresi.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji ketidaksamaan variance dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan *scatterplot*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penelitian ini tidak menyebabkan varians tidak seragam.



**Tabel 2.**  
Hasil Analisis Regresi

Jalur	Koefisien Jalur	Nilai Sig	Simpulan
X1==>	0.161	0.027	Berpengaruh
X2==>	0.163	0.262	Tidak Berpengaruh
X3==>	0.260	0.004	Berpengaruh
Persamaan jalurnya sebagai berikut : $Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$ $Y = 11.244 + 0.161 X_1 + 0.163 X_2 + 0.260 X_3 + e$			

Berdasarkan tabel tersebut dapat dibuat analisis sebagai berikut:

- Nilai koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian Intern 0.161 (Positif) disimpulkan bahwa setiap peningkatan sistem pengendalian intern meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,161.
- Nilai koefisien regresi variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 0.163 (Positif) Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan sistem akuntansi keuangan daerah meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,163.
- Nilai koefisien regresi variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia 0.260 (Positif) hal ini menunjukkan bahwa setiap kali Kompetensi Sumber Daya Manusia meningkat, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,260.

## B. Pembahasan Penelitian

### 1. Pembahasan Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPI, SAKD dan KSDM secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap KLKPD. Penelitian ini membuktikan bahwa SPI, SAKD dan KSDM secara simultan mempengaruhi KLKPD.

### 2. Pembahasan Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPI berpengaruh terhadap KLKPD. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Kiranayanti dan Erawati, 2016) bahwa SPI berpengaruh terhadap KLKPD. Hal ini menunjukkan bahwa SPI dilakukan secara optimal dan juga bisa tetap terjaga dari risiko atau kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Hal ini dapat mendukung pelaporan keuangan yang andal. Dengan demikian meningkat penerapan SPI, maka meningkat jua pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

### 3. Pembahasan Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian membuktikan bahwa SAKD tidak berpengaruh terhadap KLKPD. Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini ditolak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widyatama et al 2017) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dipercaya tidak mudah atau tidak gampang buat digunakan, sehingga kurangnya mendukung pada hal melakukan pemrosesan data-data yg akan diinput. Tidak maksimalnya penggunaan SAKD ditentukan KSDM. Apabila kualitas & pemahaman tentang Sistem Akuntansi Daerah dibekali menggunakan pemahaman yg mencukupi maka SDM tidak akan bisa membuat Kualitas Laporan Keuangan Pemda telah sinkron

menggunakan standar akuntansi pemerintahan yg terdapat & pula dilaporkan secara maksimal, maka **output** kualitas laporan keuangan pemerintah akan efektif & maksimal.

#### 4. Pembahasan Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian membuktikan bahwa KSDM berpengaruh terhadap KLKPD. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini diterima. Penelitian ini searah dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Darmawan & Darwanis, 2018) disebutkan bahwa KSDM mempengaruhi KLKPD. Artinya, semakin baik talenta, semakin baik pemerintah daerah bisa menciptakan laporan keuangan yang berharga dan berkualitas tinggi.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa pemerintah daerah harus lebih memperhatikan lagi tentang SPI dan KSDM, agar dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang valid, reliabel, dapat dipercaya dan dapat dibandingkan. Dengan begitu maka akan semakin baik kemampuan dari pemerintah daerah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan berkualitas. Hal ini meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan berkualitas tinggi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Armel, R. Y. G. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai)*. JOM Fekon, 4(1), 105–119.
- Darmawan, A., & Darwanis. (2018). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal , Pemanfaatan Teknologi , Kompetensi Sumberdaya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPA Provinsi Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 3(1), 9–19.
- Faishol, A. (2016). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan)*. Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi, 1(3), 205–212.
- Halim, A. (2018). *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep Dan Aplikasi (Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan)*. Salemba Empat.
- Ifat, F. (2018). *Dasar-Dasar Akuntansi Untuk Pemula Dan Orang Awam*. Serambi Baru.
- Kiranayanti, I. A. E., & Erawati, N. M. A. (2016). *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. E-Jurnal Akuntansi, 16(2), 1290–1318.
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*. Riset Akuntansi Going Concern, 12(2), 874–890.
- Rokhlinsari, S., & Hidayat, A. (2016). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Bank BJB Syariah Cirebon*. Al-Amwal, 8(2), 491–508.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta.
- Triwardana, D. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)*. JOM Fekon, 4(1), 641–655.